

Pengimplementasian Sistem Demokrasi Pancasila dalam Organisasi Kepemudaan Karang Taruna

Ridha Haifarashin¹, Dinie Anggraeni Dewi²

^{1,2} Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: rida04@upi.edu¹, dinieanggraenidewi@upi.edu²

Abstrak

Pada dasarnya suatu negara dikatakan demokratis jika rakyatnya berkedudukan sama di depan hukum, mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh penghasilan yang layak serta adanya pemerataan yang adil. Demokrasi yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia bukanlah tiruan dari demokrasi negara lain, tetapi didasari dari nilai-nilai luhur pancasila serta budaya bangsa Indonesia sendiri yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Dengan adanya demokrasi pancasila diharapkan dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah serta mufakat di antara seluruh warga negara Indonesia serta dapat mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Demokrasi juga membangun sikap nilai-nilai demokratis, seperti kesetaraan, toleransi, dan kebebasan. Implementasi nilai adalah proses menerapkan atau mengimplementasikan ide-ide yang berdampak positif berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Menerapkan nilai-nilai berarti memberikan penerapan nilai-nilai inti kehidupan. Hal ini menjadi pilihan keyakinan atau tindakan seseorang dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh implementasi demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kegiatan Karang Taruna perlu memperhatikan hak, kewajiban, dan kedudukan yang perlu disamaratakan antara seluruh pengurus karang taruna, dengan menggunakan akal sehat serta hati nurani yang ikhlas serta memberikan kepercayaan terhadap perwakilan yang telah dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Lalu pada saat merancang beberapa program kerja atau pada suatu pengambilan keputusan, karang taruna selalu mengadakan pelaksanaan musyawarah untuk menggapai mufakat. Musyawarah merupakan salah satu cara agar memperoleh sebuah keputusan serta mencapai kesepakatan, tetapi pada musyawarah akan terjadi beberapa silang pendapat yang berbeda, keegoisan dalam mempertahankan pendapatnya sendiri, walaupun hal tersebut terjadi tetapi dengan musyawarah hal tersebut dapat diatasi.

Kata kunci: *Implementasi, Demokrasi, Pancasila, Musyawarah*

Abstract

Basically a country is said to be democratic if its people are equal before the law, have the opportunity to participate in the decision-making process, and earn a decent income and fair distribution. The democracy implemented by the Indonesian people is not an imitation of the democracy of other countries, but is based on the noble values of Pancasila and the culture of the Indonesian nation itself which is known as Pancasila democracy. With the existence of Pancasila democracy, it is hoped that an agreement can be reached through deliberation and consensus among all Indonesian citizens and can achieve common goals and interests. Democracy also builds attitudes of democratic values, such as equality, tolerance, and freedom. Value implementation is the process of implementing or implementing ideas that have a positive impact in the form of changes in knowledge, skills, values, and attitudes. Applying values means providing the application of the core values of life. This becomes a person's choice of beliefs or actions and is manifested in everyday life. One example of the implementation of Pancasila democracy in everyday life is that in Karang Taruna activities, it is necessary to pay attention to the rights, obligations, and positions that need to be equalized between all youth organizations, using common sense and a sincere conscience

and giving trust to representatives who have been trusted. to carry out deliberations. Then when designing several work programs or in making a decision, Karang Taruna always conducts deliberation to reach consensus. Deliberation is one way to get a decision and reach an agreement, but at the deliberation there will be several different opinions, selfishness in defending their own opinion, even though this happens but with deliberation it can be overcome.

Keywords : *Implementation, Democracy, Pancasila, Deliberation*

PENDAHULUAN

Jika suatu keluarga selalu berdiskusi secara konsisten dan dapat memecahkan suatu persoalan serta seluruh anggota keluarga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing, dan seluruh anggota keluarga juga saling menghormati pendapat satu sama lain, maka keluarga tersebut sudah mengimplementasikan sikap demokratis dalam lingkungan keluarga.

Demikian juga, jika sikap demokratis diterapkan dalam lingkup sekolah, siswa dapat mengembangkan sikap demokratis jika guru selalu memberikan siswanya kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan pendapat selama proses pembelajaran. Demikian pula, masyarakat mengembangkan sikap demokratis ketika semua masalah diselesaikan dengan musyawarah.

Pada cakupan wilayah negara, jika negara dapat mengadakan pemilihan umum secara jujur dan adil. Maka negara telah memulai demokrasi, jika suatu negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warganya, berarti demokrasi dibudayakan di negara tersebut dan bahwa nilai demokrasi dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan warga negaranya.

Pemahaman mengenai makna dari demokrasi sangatlah penting dimiliki, agar tidak tersandung terhadap penafsiran yang kurang tepat dalam memaknai demokrasi. Jika telah salah pemahaman pada penafsiran arti dari maka dalam pengimplementasiannya pun akan tidak tepat

Ada beberapa silang pendapat mengenai makna dari demokrasi, setiap orang telah memaparkan pendapatnya masing-masing dan ada pendapat yang beragam, adapula yang tidak ingin menghargai pendapat orang lain. Ada beberapa orang maupun suatu kelompok yang memaknai demokrasi dengan didasari oleh sudut pandang agama, politik dan lain sebagainya.

Demokrasi awal mulanya berasal dari dua kata yang terdapat dalam bahasa Yunani, yaitu kata *demos* yang memiliki arti yaitu rakyat/masyarakat serta dari kata *kratos* atau *cratein* yang memiliki arti suatu sistem pemerintahan. Maka demokrasi memiliki arti yaitu sistem pemerintahan rakyat. Kata tersebut juga lalu diterapkan pada suatu kata pada bahasa Inggris yaitu kata *democracy*. Konsep tentang demokrasi adalah salah satu kosakata yang penting pada bidang politik, karena demokrasi selalu disebut sebagai suatu dasar perkembangan sistem politik pada suatu pemerintahan negara.

Demokrasi yang diberlakukan oleh bangsa Indonesia bukanlah tiruan dari demokrasi negara lain, tetapi didasari dari nilai-nilai luhur Pancasila serta budaya bangsa Indonesia sendiri yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila. Dengan adanya demokrasi Pancasila diharapkan dapat mencapai kesepakatan melalui musyawarah serta mufakat di antara seluruh warga negara Indonesia serta dapat mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Demokrasi juga membangun sikap nilai-nilai demokratis, seperti kesetaraan, toleransi, dan kebebasan.

Demokrasi selalu terkait mengenai nilai kebebasannya, tetapi kebebasan itu berdasarkan regulasi. Nilai demokrasi Pancasila penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam kegiatan organisasi kepemudaan, Nilai demokrasi Pancasila harus terus merasuk ke jiwa seluruh warga negara, terutama pada generasi milenial. Untuk membiasakan sikap yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila,

diperlukan suatu langkah untuk mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi pancasila itu sendiri.

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut.

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Demokrasi Pancasila adalah "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dsms permusyawaratan/ perwakilan; yang beketuhanan Yang Maha Esa; yang berkemanusiaan yang adil dan beradab; yang berpersatuan Indonesia; serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan ini terkandung arti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah di sertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing; menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia; haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa; serta harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi, demokrasi Pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu sendiri sudah lama dianut dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di pedesaan.

Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi. Demokrasi Pancasila juga dimengerti sebagai paham yang sumbernya berasal dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia. Falsafah hidup ini kemudian yang melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila juga merupakan demokrasi konstitusional, sebagaimana di nyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus di junjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila hak tersebut tetap di hargai tetapi harus diimbangi dengan kebebasan yang bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan salah satu metode yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode analisis dengan cara memahami buku, jurnal, literatur, laporan penelitian terkait dengan suatu permasalahan yang ingin diselesaikan. Penelitian dilakukan dengan menggali sumber yang menjelaskan mengenai pengimplementasian sistem demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi nilai adalah proses menerapkan atau mengimplementasikan ide-ide yang berdampak positif berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Menerapkan nilai-nilai berarti memberikan penerapan nilai-nilai inti kehidupan. Hal ini menjadi pilihan keyakinan atau tindakan seseorang dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi bangsa Indonesia, demokrasi Pancasila merupakan pilihan yang tepat untuk melaksanakan konsep demokrasi. Pengertian demokrasi Pancasila adalah pemahaman tentang kepribadian suatu negara yang digali dari nilai-nilai sosial budayanya sendiri. Hal ini telah dilakukan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Fakta ini ditemukan

dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menggunakan “musyawarah serta mufakat” dan “gotong royong” untuk menyelesaikan masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar.

Dalam hakikatnya rumusan Demokrasi Pancasila telah tertuang pada sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hal tersebut pada hakikatnya adalah serangkaian yang memiliki kaitan yang erat antar satu sila dengan sila yang lain. Pada pembahasan hal tersebut juga telah diungkapkan oleh Notonegoro yang mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik utama pada Demokrasi Pancasila terdapat pada sila keempat pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Maka berarti, Demokrasi Pancasila telah memiliki tiga karakteristik utama, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan.

Pada tiga karakteristik diatas sekaligus memiliki kedudukan sebagai pengimplemetasian demokrasi di Indonesia. Dengan adanya hal tersebut maka secara langsung memberikan kesempatan kepada warga Indonesia untuk berperan aktif untuk menyampaikan pendapat pada pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh para pemerintah. Dengan adanya permusyawaratan dapat mewujudkan persatuan yang dapat mengatasi kesalah pahaman antara perseorangan maupun golongan. Dan dengan adanya cita-cita hikmat kebijaksanaan adalah keinginan bangsa Indonesia sesuai dengan demokrasi yang di implementasikan di Indonesia adalah demokrasi yang di dasari pada nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.

Pada dasarnya suatu negara dikatakan demokratis jika rakyatnya berkedudukan sama di depan hukum, mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan memperoleh penghasilan yang layak untuk pemerataan yang adil dan kebebasan.

Dalam negara demokrasi, pemerintahan yang memegang kuasa adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dan pemerintahan yang mengatur negara harus mendapat dukungan dan partisipasi dari rakyat. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dan demokrasi yang ada di Indonesia disebut demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi lainnya.

Kansil (1986:51) menyatakan bahwa perbedaan antara demokrasi pancasila dengan demokrasi lainnya adalah pemerintahan dengan demokrasi pancasila pelaksanaannya didasarkan pada pemahaman tentang nilai-nilai dan persatuan yang terkandung dalam pancasila.

Salah satu contoh implementasi demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kegiatan Karang Taruna perlu memperhatikan hak, kewajiban, dan kedudukan yang perlu disamaratakan antara seluruh pengurus karang taruna, dengan menggunakan akal sehat serta hati nurani yang ikhlas serta memberikan kepercayaan terhadap perwakilan yang telah dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Lalu pada saat merancang beberapa program kerja atau pada suatu pengambilan keputusan, karang taruna selalu mengadakan pelaksanaan musyawarah untuk mufakat. Musyawarah merupakan salah satu cara agar memperoleh sebuah keputusan serta mencapai kesepakatan, tetapi pada musyawarah akan terjadi beberapa silang pendapat yang berbeda, keegoisan dalam mempertahankan pendapatnya sendiri, walaupun hal tersebut terjadi tetapi dengan musyawarah hal tersebut dapat diatasi.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Kansil (1986: 5152) bahwa sistem musyawarah mufakat dengan demokrasi pancasila ini tidak mengakui bahwa yang kuat (mendapatkan suara terbanyak) menindas yang lemah dan yang besar menindas yang kecil. Dalam demokrasi pancasila dikenal untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah di antara seluruh anggota untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Pada dasarnya seluruh anggota dari Karang Taruna berkewajiban memiliki kesadaran agar bersikap baik serta memiliki rasa bertanggung jawab agar menghargai serta dan melaksanakan hasil dari musyawarah. Kesepakatan yang telah diraih pada musyawarah adalah keputusan yang ditujukan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi maupun golongan.

Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari Marzuki (2014: 7) menyatakan bahwa demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan atas keselarasan hak dan kewajiban berdasarkan gotong royong dengan kerabat, kedaulatan di tangan rakyat, dan pengambilan keputusan secara mufakat.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan berbagai interaksi sosial dan bentuk dari interaksi sosial yang telah dijalin. Pada pihak individu juga tidak bisa lepas dari situasi tempat individu tersebut berada serta situasi di lingkungan tempat tinggalnya memiliki pengaruh pada kelompok yang terbentuk akibat dari situasi tersebut.

Menurut Hasibuan (2003:24), organisasi adalah suatu sistem persatuan yang formal, terstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan Karang Taruna yang salah satunya adalah terlaksananya pembangunan terhadap kesejahteraan sosial pada generasi milenial di desa yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan.

Untuk menjalankan aktivitasnya, organisasi harus memiliki dukungan. Dukungan itu sendiri terlihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam kegiatan Karang Taruna. Beberapa bentuk dukungan dari Desa-Desa se-Indonesia terlihat ketika Karang Taruna melakukan kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI. Desa-desa se-Indonesia sangat antusias berkontribusi untuk kelancaran acara tersebut. Selain itu, ketika Karang Taruna mengadakan pertemuan untuk membahas kegiatan tersebut bersama pihak dari luaran agar disediakan fasilitas sarana atau prasarana.

Dukungan dari pihak desa dapat diwujudkan dengan mempercayai serta mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna tetapi tetap membawa dampak positif bagi remaja yang ada di desa. Terkait faktor yang dapat mendukung implementasi nilai demokrasi Pancasila pada kegiatan Karang Taruna membahas mengenai pandangan tentang kegiatan yang dilaksanakan Karang Taruna diantaranya harus dapat memberikan manfaat antara lain memberikan pengetahuan atau wawasan dan pengalaman baru mengenai bagaimana cara berorganisasi, menerapkan kerukunan dan kebersamaan diantara sesama, dan menjalin silaturahmi. Melalui kegiatan di Karang Taruna berbagai macam pendapat dan kreativitas dapat disalurkan, karena generasi milenial adalah agen perubahan.

Hal ini senada dengan pendapat Sugiyarto (2010: 68-72) yang menyatakan bahwa generasi muda memiliki potensi yang sangat penting salah satunya adalah potensi sebagai agen perubahan. Siapapun akan mengakui, bahwa kaum muda merupakan aset penting bangsa. Generasi muda sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), dan pemegang kebijakan masa depan.

Hambatan yang dialami Karang Taruna dalam implementasi nilai demokrasi Pancasila salah satunya adalah partisipasi anggota. Partisipasi anggota dapat dilihat dari keaktifan anggota saat diadakanya rapat membahas kegiatan Karang Taruna. Disitu dapat dilihat mana anggota yang selalu aktif dalam mengeluarkan pendapat dan mempertahankan pendapatnya serta anggota yang hanya ikut-ikutan saja. Hal tersebut merupakan faktor yang terdapat dalam diri individu itu sendiri.

Hal ini selaras dengan pemikiran Robbins (dalam Umar, 2003 : 15-16) yang menyatakan bahwa permasalahan pokok individu dalam organisasi misalnya:

1. karakteristik biografis, seperti: usia, jenis kelamin, status keluarga, dan masa kerja,
2. kemampuan intelektual dan kesehatan fisik,
3. kepribadian, seperti: kesadaran diri,
4. belajar,
5. persepsi dan inisiatif dalam pengambilan keputusan,
6. nilai, sikap, dan keputusan kerja,

7. motivasi.

Implementasi nilai demokrasi Pancasila dapat berjalan apabila semua anggota Karang Taruna berperan aktif dalam semua kegiatan yang ada dalam Karang Taruna, jika tidak maka, implementasi nilai demokrasi Pancasila sedikit terhambat. Organisasi dikatakan dapat berjalan salah satu faktornya yaitu dari partisipasi anggotanya sendiri, karena aktif atau tidaknya anggota sangatlah berpengaruh di kedepannya. Di setiap agenda rapat Karang Taruna setidaknya masih ada anggota yang masih aktif berperan dalam Kegiatan Karang Taruna.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu contoh implementasi demokrasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kegiatan Karang Taruna perlu memperhatikan hak, kewajiban, dan kedudukan yang perlu disamaratakan antara seluruh pengurus karang taruna, dengan menggunakan akal sehat serta hati nurani yang ikhlas serta memberikan kepercayaan terhadap perwakilan yang telah dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Lalu pada saat merancang beberapa program kerja atau pada suatu pengambilan keputusan, karang taruna selalu mengadakan pelaksanaan musyawarah untuk menggapai mufakat. Musyawarah merupakan salah satu cara agar memperoleh sebuah keputusan serta mencapai kesepakatan, tetapi pada musyawarah akan terjadi beberapa silang pendapat yang berbeda, keegoisan dalam mempertahankan pendapatnya sendiri, walaupun hal tersebut terjadi tetapi dengan musyawarah hal tersebut dapat diatasi.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Kansil (1986: 5152) bahwa sistem musyawarah mufakat dengan demokrasi pancasila ini tidak mengakui bahwa yang kuat (mendapatkan suara terbanyak) menindas yang lemah dan yang besar menindas yang kecil. Dalam demokrasi pancasila dikenal untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah di antara seluruh anggota untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Pada dasarnya seluruh anggota dari Karang Taruna berkewajiban memiliki kesadaran agar bersikap baik serta memiliki rasa bertanggung jawab agar menghargai serta dan melaksanakan hasil dari musyawarah. Kesepakatan yang telah diraih pada musyawarah adalah keputusan yang ditujukan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi maupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alav, Özlem. 2016. "Demokrasi." *Vatandaşlık bilgisi*: 177–201.
- Astawa, I Putu Ari. 2017. "Materi Kuliah Kewarganegaraan." *Universitas Udayana* (13): 5.
- Azikin, Andi. 2018. "Konsep Dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*: 77–90.
- Bera, Karolin. 2019. "Demokrasi Pancasila Dan Relevansinya Terhadap Kesenjangan Hukum Di Indonesia." : 2–4. <https://osf.io/z7wm4/download/?format=pdf>.
- Humaira, Annisa. 2010. "Konsep Negara Demokrasi." 3(1): 288.
- Islamey, Asilka. 2011. "Penerapan Demokrasi Pancasila." *Jurnal ilmiah-PKn. STMIK AMIKOM Yogyakarta* 1(4): 4–9.
- Pratama, Siska. 2020. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas V Sdn 03 Negeri Batin Kec." *skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Negeri raden Intan Lampung*: hlm.3.
- Purnamawati, Evi. 2020. "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia." *Solusi* 18(2): 251–64.
- Purnaweni, Oleh Hartuti. 2004. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik* 3(2): 118–31.
- Rahmah, Azzahra. 2020. "Prinsip Demokrasi Pancasila." *Rumus.Co.Id*: 2–5.
- Rohman, Abdul. 2015. "Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 17 Nomor 1 | Halaman 76 - 97." *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 17 No 1(1): 76–97.
- Syafriadi, Syafriadi. 2017. "Pelaksanaan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *UIR Law Review* 1(1): 25–38.

- Tarigan, Pitiadani Br. 2013. "Implentasi Demokrasi Di Indonesia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Zakaria, Eka. 2009. "Demokrasi Dan Negara Hukum Muntoha." *Jurnal Hukum* 16(3): 379–95.